

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor
296/Pid.Sus/2021/PN.Kis)**

ABSTRAK

Anggiat Stevanus Pasaribu *
Adil Akhyar, S.H., LL.M. Ph.D**
Nelvitia Purba, S.H., M.Hum, Ph.D**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh penegak hukum, juga terhadap pelaku telah banyak pula yang dijatuhi putusan pengadilan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum bagi pecandu dan penyalahguna narkotika, Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pecandu dan pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengguna dan penyalahguna narkotika dalam putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis.

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada undang-undang dan yuridis empiris dengan melakukan penelitian di Polres Asahan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian.

Pengaturan hukum tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penegakan hukum terhadap pecandu dan pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika meliputi upaya penanggulangan secara *non penal policy* yaitu upaya *pre-emptif* (penyuluhan) dan *preventif* (pencegahan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis adalah terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat bulan telah tepat untuk dapat dilakukan pembinaan

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pecandu, Narkotika

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I dan II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**LAW ENFORCEMENT AGAINST ADDICTIVES AND NARCOTICS
ABUSES ACCORDING TO LAW NUMBER 35 YEAR 2009
ABOUT NARCOTICS
(Study on the Decision of the Kisaran District Court Number
296/Pid.Sus/2021/PN.Kis)**

ABSTRACT

Anggiat Stevanus Pasaribu *
Adil Akhyar, S.H., LL.M. Ph.D**
Nelvitia Purba, S.H., M.Hum, Ph.D**

Law enforcement against narcotics crimes has been widely carried out by law enforcers, as well as many perpetrators who have been sentenced to court decisions and are serving sentences in correctional institutions. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the law for narcotics addicts and abusers, How is law enforcement against narcotics addicts and users according to Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, What is the basis for judges' considerations in making decisions against narcotics users and abusers in Decision Number 296 /Pid.Sus/2021/PN.Kis.

The type of this research is normative juridical, namely research based on law and empirical juridical by conducting research at the Asahan Police Station. Data analysis was carried out qualitatively, which is a form of analysis that does not rely on numbers but on sentences. Drawing conclusions in this paper is carried out using deductive-inductive logic of thinking that is done with the theory that is used as a starting point for conducting research.

The results of the study indicate that the legal regulation of narcotics crimes based on Law Number 35 of 2009. Law enforcement against addicts and narcotics users according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics includes non-penal policy countermeasures, namely pre-emptive (counseling) and preventive (prevention) efforts. The judge's consideration in making a decision against the perpetrators of narcotics crimes in the decision of the Kisaran District Court Number 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis is that the defendant must be held accountable for his actions in accordance with the decision handed down by the judge, namely imprisonment for 9 (nine) years and a fine 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 4 (four months) is appropriate for coaching to be carried out.

Keywords: Law Enforcement, Addicts, Narcotics

** Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I and II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*